



**KEBIJAKAN MANAJEMEN MEMBINGKAI ULANG KURIKULUM RUMPUN ILMU MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN DI INDONESIA**

**Usman Radiana<sup>1\*</sup>, Zseilla Nur Intania Achmad<sup>2</sup>, Iswahyuni Lestari<sup>3</sup>, Eis Kurniasih<sup>4</sup>**

Universitas Tanjungpura, Indonesia<sup>1,2,3,4</sup>

usmanradiana@gmail.com<sup>1</sup>, sheillaintania@gmail.com<sup>2</sup>,

iswahyunilestari30@gmail.com<sup>3</sup>, e.kurniasih315@gmail.com<sup>4</sup>

**INFO ARTIKEL**

**ABSTRAK**

**Diterima :** 01-10-2022

**Direvisi :** 16-10-2022

**Disetujui :** 20-10-2022

**Kata kunci:** manajemen Kebijakan, kurikulum, pendidikan, pembiasaan manajemen

Perancangan kurikulum manajemen yang efektif dan efisien membuat pembelajaran di Perguruan Tinggi dapat berjalan dengan baik. Indonesia memiliki dua nama program yaitu pendidikan manajemen dan pendidikan administrasi sehingga arah kurikulum berbeda menggambarkan keberagaman kurikulum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang manajemen kebijakan dalam rangka pengulangan kurikulum administrasi dan manajemen pengetahuan lapangan di LPTK Indonesia. LPTK yang dimaksud adalah Universitas Tanjungpura, Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau, dan Universitas Negeri Malang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dengan dokumen studi dan analisis. Analisis data menggunakan tiga langkah yaitu; pengurangan data, tampilan dan kesimpulan / verifikasi.

Hasil penelitian diperoleh informasi: terdapat sejumlah mata kuliah kelompok yang diajarkan misalnya Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Keahlian (MKK), Fakultas MKK, Program Studi MKK, MKK Wajib dan MKK Gratis. Bobot yang diperlukan dan total sks yang diambil oleh mahasiswa berbeda antara LPTK dalam Manajemen Pendidikan dan Administrasi Pendidikan. Sistem Manajemen Kurikulum harus memenuhi langkah-langkah desain instruksional, persiapan silabus, dan perencanaan kursus. Pembingkai ulang kurikulum perlu mempertimbangkan penyusunan desain operasional yang meliputi penyusunan infrastruktur yang memadai, pendanaan, personel, jadwal, dan pemahaman sistem oleh seluruh pengguna dan pendidik yang terlibat.

**ABSTRACT**

*Designing an effective and efficient management curriculum makes learning in higher education run well. Indonesia has two program names, namely management education and administrative education so that different curriculum directions describe curriculum diversity.*

*This study aims to collect data on policy management in the context of repeating the administration curriculum and field knowledge management in Indonesian LPTKs. The LPTKs in question are Tanjungpura University, Bandung Indonesian Education University, Jakarta State University, Syarif Kasim State Islamic University Riau, and Malang State University.*

*This research uses descriptive method, qualitative approach, with the type of case study research. Data collection with study documents and analysis. Data analysis uses three steps, namely; data reduction, display and conclusion/verification.*

*The results of the research obtained information: there are a number of*

**Keywords:** management Policy, reframing, management, curriculum education

---

*group courses taught such as General Courses (MKU), Expertise Courses (MKK), Faculty of MKK, Study Programs MKK, Compulsory MKK and Free MKK. The required weights and the total credits taken by students differ between LPTKs in Educational Management and Educational Administration. The Curriculum Management System must meet the steps of instructional design, syllabus preparation, and course planning. Curriculum reframing needs to consider the preparation of operational designs which include the preparation of adequate infrastructure, funding, personnel, schedules, and understanding of the system by all users and educators involved.*

\*Author: Usman Radiana

Email : [usmanradiana@gmail.com](mailto:usmanradiana@gmail.com)

---

## **Pendahuluan**

Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui proses pembelajaran ([Rini & Tari, 2013](#)). Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan sebuah pedoman yang memuat segala rencana pembelajaran dan materi pelajaran yaitu kurikulum ([Alawiyah, 2013](#)). Melalui kurikulum, sebuah tujuan pendidikan dirancang mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Perubahan kurikulum di tingkat pendidikan tinggi sudah sejak lama dilakukan, mulai dari kurikulum yang berbasis pada Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila Tahun 1961 hingga sekarang yaitu kurikulum KKNI dan Kurikulum Merdeka ([Nurhayati & Sidik, 2022](#)).

Secara ideologis dan politis, kebijakan manajemen dalam praktik membingkai ulang kurikulum meninggalkan jejak pada rancangan dan penerapan kurikulum di pendidikan tinggi. Dalam banyak kasus, kebijakan ini menentukan apa, mengapa, dan bagaimana sebuah proses dan tujuan pembelajaran dicapai. Melalui dokumen kebijakan dan kurikulum, tetapan dan standar dan kompetensi pendidikan selalu ditentukan tanpa pengetahuan yang komprehensif tentang pemahaman manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan yang lebih baik tentang tujuan perencanaan, kolaborasi antara pembuat kebijakan, pembuat kurikulum, dan negosiasi yang ketat antara kebutuhan lokal dan tuntutan globalisasi ([Majir, 2020](#)).

Rancangan kurikulum manajemen pendidikan berpedoman pada transformasi tergantung pada bagaimana rancangan tersebut dapat dirasakan bermakna. Proses (kurikulum yang diberlakukan atau dialami), dan produk (kurikulum yang dinilai atau divalidasi) Di Indonesia, terdapat dua nama untuk program manajemen bidang pendidikan yaitu manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan. Arah kurikulum manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan yang berbeda ini menggambarkan keragaman kurikulum pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tingkat paling dasar, dosen berkewajiban untuk menerjemahkan dan menjalankan kebijakan kurikulum yang berdampak pada praktik pembelajaran mereka. Selain itu, dosen juga mempunyai kewajiban untuk merangkai kembali kebijakan kurikulum ini menjadi kurikulum kampus dan kelas yang sejalan dengan kerangka praktik pembelajaran setempat.

Dalam hal ini, Dosen bertugas sebagai pembuat kebijakan yang terlibat langsung dalam pemberlakuan kebijakan pendidikan di tingkat lokal mencakup

pengalaman kelas peserta didik mereka. Dengan demikian, cara melihat kurikulum manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan melalui kaca mata kritis terhadap situasi, dosen manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan menyadari sepenuhnya bahwa dokumen tersebut ialah kenyataan praktik kebijakan kurikulum, dan tidak mengajarkan kurikulum secara utuh namun mereka membingkai kembali kurikulum tersebut yang relevan dengan praktik pendidikan dalam kondisi sosial, politik, dan ekonomi lokal dan global.

Mengingat pentingnya fungsi manajemen pendidikan tinggi dalam membingkai ulang kurikulum ([Wiyono](#), 2012). Menarik untuk dikembangkan inovasi-inovasi yang akan membuat manajemen kurikulum pendidikan tinggi lebih efektif dan efisien. Inovasi dalam sistem manajemen sekolah yang meningkatkan kualitas dan kinerja mereka. Rancangan instruksional kurikulum pada awalnya dipelopori oleh teori psikologi perilaku dan kognitif. Menurut ([Hrivnak](#), 2019) dalam mendekati desain kurikulum dari pandangan konstruktivis, pembelajaran terjadi sebagai hasil dari apa yang dilakukan peserta didik, bukan apa yang dilakukan oleh dosen.

Universitas Tanjungpura (UNTAN), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Kasim Riau, dan Universitas Negeri Malang (UNM) merupakan LPTK di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan. Dengan dasar pertimbangan dan data awal inilah peneliti mengambil penelitian di LPTK ini sehingga mendapatkan gambaran tentang kebijakan manajemen dalam praktik membingkai ulang kurikulum.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan (1) Temuan dan analisis dari kebijakan manajemen kurikulum ilmu manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan LPTK di Indonesia. (2) Sistem manajemen kurikulum ilmu manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan LPTK di Indonesia. (3). Kebijakan manajemen membingkai ulang kurikulum ilmu manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan LPTK di Indonesia dan (4) Hasil dan dampak dari kebijakan manajemen membingkai ulang kurikulum ilmu manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan LPTK di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik untuk kepentingan teoritis maupun kepentingan praktis dalam pengelolaan kurikulum manajemen pendidikan dan administrasi pendidikan.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bersifat naturalistik dalam pengumpulan data ([Mulyadi](#), 2011). Jenis penelitian ini adalah *case studi* (studi kasus) dengan melakukan secara eksploratif yang bersifat mendalam dengan menganalisis apa yang sebenarnya terjadi di balik fakta atau kasus. Sumber data dalam penelitian ini adalah partisipan yang terdiri dari Ketua Prodi dan Dosen Universitas Tanjungpura serta dokumen kurikulum pada lima LPTK di Indonesia yaitu Universitas Tanjungpura, Universitas Pendidikan

Indonesia (UPI) Bandung, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Kasim Riau, dan Universitas Negeri Malang (UNM). Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni – Agustus 2022. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipan, wawancara dan dokumentasi. Langkah-langkah dalam teknik analisis data yaitu (1) reduksi data, (2) penyajian data, (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan hasil temuan perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam menarik kesimpulan. Uji keabsahan data dalam penelitian meliputi: uji kredibilitas data, uji *transferability*, uji *depanability*, dan uji *confirmability*. Selanjutnya peneliti melakukan triangulasi (sumber, teknik dan waktu).

### **Hasil Dan Pembahasan**

LPTK atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan adalah lembaga yang diawasi oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi untuk dijadikan tempat menempuh pendidikan bagi calon tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Lembaga ini merupakan universitas menyediakan ilmu keguruan, misalnya FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), IKIP (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan), dan STKIP (Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan). Pengertian LPTK terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2017 menyebutkan Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Tujuan dibentuknya LPTK adalah untuk meningkatkan keahlian, kompetensi, skill bagi guru. Namun demikian, ada tujuan lain yang bisa dicapai, yaitu sebagai berikut.

1. Membentuk guru yang berkualitas di bidang studinya masing-masing sesuai dengan kebutuhan zaman, baik guru SD, SMP, maupun SMA.
2. Membentuk tenaga kependidikan nonguru yang agar memiliki kinerja mumpuni untuk menunjang sistem pendidikan, contohnya tenaga administrasi, laboran, dan sebagainya.
3. Mengembangkan profesionalitas guru yang meliputi ilmu, teknologi, dan seni kependidikan.
4. Mengabdikan pada masyarakat tentang hal-hal terkait kependidikan.
5. Memperbaiki dan mengembangkan pengelolaan pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, metodologi, dan seni kependidikan.

LPTK di seluruh Indonesia ini berjumlah 425 pada tahun 2018, baik dari universitas negeri maupun swasta. Kehadiran LPTK masih sangat dibutuhkan pemerintah dalam upaya menciptakan sumber daya manusia berkualitas. Pasalnya, LPTK menjadi semacam kawah candradimuka bagi guru kompeten yang akan mengajar di semua sekolah dasar dan menengah nasional. Melalui pendidikan, masyarakat menjadi cerdas, unggul, berdaya saing, dan berkarakter.

Rumpun Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan dan Administrasi Pendidikan bertugas mengembangkan ilmu administrasi pendidikan yang berlandaskan filosofi dan budaya Indonesia dan mengembangkan praksis administrasi pendidikan yang berwawasan global dengan mempersiapkan mahasiswa menjadi tenaga profesional di bidang tata usaha lembaga-lembaga pendidikan (Halik, 2019), terutama sekolah. Selain itu, mahasiswa mempelajari proses pengintegrasian segala aktivitas kelembagaan yang terkait untuk tercapainya tujuan pendidikan. Lulusannya dipersiapkan menjadi administrator yang berperan sebagai perumus, pelaksana, dan analis kebijakan publik di bidang pendidikan misalnya menjadi Tenaga Pengawas Pendidikan, Tenaga Pengelola Pendidikan, Tenaga Perencana Pendidikan, Koordinator online learning, Pustakawan yang berkompeten.

Kurikulum dimaknai dalam tiga konteks, yaitu sebagai sejumlah mata yang harus ditempuh oleh peserta didik, sebagai pengalaman belajar, dan sebagai rencana program belajar (Nur, 2011). Pengertian kurikulum sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik merupakan konsep kurikulum yang sampai saat ini banyak mewarnai teori-teori dan praktik pendidikan (Sanjaya, 2008). Dalam makna ini kurikulum sering dikaitkan dengan usaha untuk memperoleh ijazah, sedangkan ijazah itu sendiri adalah keterangan yang menggambarkan kemampuan seseorang yang mendapatkan ijazah tersebut (Sukariyadi, 2022).

Kurikulum idealnya adaptif dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi (Prastowo, 2018). Tujuannya agar luaran pendidikan memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pengguna dan tantangan zaman. Kebijakan dalam hal manajemen kurikulum di LPTK mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di LPTK.

Struktur kurikulum pada masing-masing LPTK juga berbeda. Terdapat beberapa kelompok mata kuliah yang diajarkan misalnya Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Keahlian (MKK), MKK Fakultas, MKK Program Studi, MKK Wajib dan MKK Bebas. Bobot dan total SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa juga berbeda antar LPTK Manajemen Pendidikan dan Administrasi Pendidikan.

Kebijakan pendidikan dalam pengajaran sesungguhnya mulai dilakukan dari struktur kurikulum yang ada (Ritonga, 2018). Tujuan pendidikan ditetapkan dengan mempertimbangkan filosofis keilmuan dan kebutuhan masyarakat. Secara garis besar, kurikulum Manajemen Pendidikan dan Administrasi Pendidikan cenderung dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah dalam sistem pendidikan nasional dalam era reformasi. Otonomi daerah mendorong desentralisasi pendidikan. Pengelolaan pendidikan diutamakan dilakukan oleh pemerintah daerah dan sekolah sebagai satuan pendidikan. Merujuk pada salah satu standar tenaga kependidikan, dalam hal ini tenaga administrasi sekolah/madrasah, telah mendorong desain kurikulum program studi S1 Manajemen Pendidikan untuk menyiapkan calon-calon tenaga tersebut.

Terkait dengan tujuan pendidikan bisa dipahami bahwa manajemen dan administrasi pendidikan berfungsi sebagai “jalan poros” menuju pencapaian tujuan itu. Jika demikian halnya, maka ruang lingkup administrasi pendidikan jelas mencakup seluruh bidang ilmu kependidikan yang mengakar pada realitas sosial baik psikologis, antropologis maupun sosiologis. Jika fungsi administrasi pendidikan itu dilaksanakan secara efektif, maka niscaya proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah mampu membuahkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam arti ahli, kreatif, dan produktif berkeadilan. SDM demikian, disebut manusia terdidik.

Memperhatikan desain kurikulum 2002 bagi Program Studi Administrasi Pendidikan, nampak terdapat ketidakkonsistenan antara filosofi awal bahwa kurikulum dirancang dengan melihat calon mahasiswa program studi ini tidak disiapkan sebagai calon guru pengajar di sekolah dan jabatan kepala sekolah dan pengawas/penilik (supervisor) hanya bisa dipegang oleh mereka yang sudah menjadi guru (berasal dari guru), namun di bagian karakteristik dan kompetensi lulusannya masih menyebutkan jabatan pengawas pendidikan dan tidak menutup kemungkinan lulusannya dapat menjadi tenaga pendidik/pengajar.

Kebijakan pendidikan mengalami perubahan besar sejak begulirnya era reformasi. Pemerintahan beralih kepada pola otonomi daerah. Pendidikan merupakan bidang yang pengelolaannya didesentralisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat menetapkan standar-standar minimal yang harus dipenuhi. Kebijakan pendidikan, khususnya terkait Administrasi Pendidikan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan di antaranya, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada dasarnya, lingkup Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan pemerintah merupakan bidang kajian dari Ilmu Administrasi Pendidikan.

Dalam administrasi pendidikan, mengelola sumber daya yang dibutuhkan untuk dijalankan dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi bahkan melampaui standar nasional tersebut. Lingkup Standar Nasional Pendidikan itu adalah standar isi; standar proses; standar kompetensi lulusan; standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; dan standar penilaian pendidikan.

Secara umum, hasil dari kebijakan Manajemen dalam Praktik Membingkai Ulang Kurikulum Rumpun Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan dan Administrasi Pendidikan dianggap berhasil dan menerima umpan balik yang sangat positif dari semua pengguna dalam kemampuannya untuk mewujudkan manajemen kurikulum pendidikan pada LPTK yang efisien dan efektif. Keberhasilan membingkai ulang kurikulum ini didukung oleh penyusunan desain operasional yang meliputi persiapan infrastruktur yang memadai, pendanaan, personel, jadwal, dan pemahaman sistem oleh seluruh pengguna yang terlibat serta tenaga pendidik yang berhasil membangun suasana interaktif dan komunikatif.

Dampak dari kebijakan Manajemen dalam Praktik Membingkai Ulang Kurikulum Rumpun Bidang Ilmu Manajemen Pendidikan dan Administrasi Pendidikan di LPTK secara umum telah meningkatkan kualitas manajemen Pendidikan Tinggi.

### **Kesimpulan**

Temuan dan Analisis Kurikulum Ilmu Manajemen Pendidikan Dan Administrasi Pendidikan diperoleh informasi bahwa Struktur kurikulum yang berbeda pada masing-masing LPTK. Terdapat beberapa kelompok mata kuliah yang diajarkan misalnya Mata Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Keahlian (MKK), MKK Fakultas, MKK Program Studi, MKK Wajib dan MKK Bebas. Bobot dan total SKS yang harus ditempuh oleh mahasiswa juga berbeda antar LPTK Manajemen Pendidikan dan Administrasi Pendidikan. Sistem Manajemen Kurikulum memenuhi langkah desain instruksional, penyusunan silabus dan rencana perkuliahan. Pada umumnya silabus memuat tema dan subtema yang akan disampaikan dalam perkuliahan. Sedangkan rencana perkuliahan yang dikenal dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau juga Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RPP) yang memuat gambaran kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan.

Kebijakan Manajemen Membingkai Ulang Kurikulum Ilmu Manajemen Pendidikan dan Administrasi Pendidikan dalam pengajaran mulai dilakukan dari struktur kurikulum yang ada serta mempertimbangkan filosofis keilmuan dan kebutuhan masyarakat ([Hidayati et al., 2021](#)). Hasil dan dampak dari kebijakan Manajemen Membingkai Ulang Kurikulum Ilmu Manajemen Pendidikan dan Administrasi Pendidikan dianggap berhasil dan menerima umpan balik yang sangat positif dari semua pengguna dalam kemampuannya untuk mewujudkan manajemen kurikulum pendidikan pada LPTK yang efisien dan efektif serta secara umum telah meningkatkan kualitas manajemen Pendidikan Tinggi.

### Bibliografi

- Alawiyah, F. (2013). Peran guru dalam kurikulum 2013. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 4(1), 65–74. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v4i1.480>
- Halik, A. (2019). *Manajemen Pembelajaran Berbasis Islam*. Global RCI.
- Hidayati, W., Syaefudin, M. P., & Muslimah, U. (2021). *Manajemen Kurikulum dan Program Pendidikan (konsep dan strategi pengembangan)* (Vol. 1). Semesta Aksara.
- Hrivnak, G. A. (2019). The increasing importance of curriculum design and its implications for management educators. *Journal of Management Education*, 43(3), 271–280. <https://doi.org/10.1177/1052562918822068>
- Majir, A. (2020). *Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Abad 21*. Deepublish.
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128–137.
- Nur, A. M. (2011). Tugas guru sebagai pengembang kurikulum. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran*, 12(1), 59–67.
- Nurhayati, M. P., & Sidik, M. (2022). *Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan*. Global Aksara Pers.
- Prastowo, A. (2018). Transformasi Kurikulum Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Indonesia. *Jip (Jurnal Ilmiah PGMI)*, 4(2), 111–125. <https://doi.org/10.19109/jip.v4i2.2567>
- Rini, Y. S., & Tari, J. P. S. (2013). Pendidikan: hakekat, tujuan, dan proses. *Jogyakarta: Pendidikan Dan Seni Universitas Negeri Jogyakarta*.
- Ritonga, M. (2018). Politik dan Dinamika Kebijakan Perubahan Kurikulum Pendidikan di Indonesia Hingga Masa Reformasi. *Bina Gogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 5(2).
- Sanjaya, W. (2008). *Kurikulum Dan Pembelajaran (Teori & Praktek KTSP)*. Kencana.
- Sukariyadi, T. I. (2022). *Manajemen Kurikulum*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/f7kb5>
- Wiyono, H. (2012). Pendidikan karakter dalam bingkai pembelajaran di sekolah. *CIVIS*, 2(2).

© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

